

Media Cetak	Suara Kedu
Tanggal	03 Oktober 2024
Wilayah	Kabupaten Purworejo



Blok Perumahan Jadi Masalah Klasik Pajak Daerah Halaman: 12



(DWH/Hubo/Kumuh)

RAPAT KOORDINASI: Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Wajib Pajak Daerah Tahun 2024, di kantor BPKPAD Purworejo, Rabu (2/10).

Blok Perumahan Jadi Masalah Klasik Pajak Daerah

■ BPKPAD Awasi dan Tagih Wajib Pajak Tak Tertib

PURWOREJO - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu masalah klasik piutang pajak daerah di Purworejo. Salah satu masalah yang cukup sering terjadi adalah menunggaknya pajak pada blok perumahan.

Terkait dengan masalah itu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) bakal mengencarkan pengawasan hingga penagihan ke wajib pajak yang tidak tertib.

Hal itu dikemukakan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Wajib Pajak Daerah Tahun 2024, di kantor BPKPAD Purworejo, Rabu (2/10). Rapat diikuti jajaran tim pengawas pajak daerah BPKPAD, serta jajaran Satpol PP Purworejo.

Rapat dipimpin oleh Kasubid Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah BPKPAD Purworejo, Toni Hartadi. Toni mengatakan, dalam pengawasan ini pihaknya akan berkolaborasi, mulai dari media, akademisi, wajib pajak, komunitas, dan lainnya.

"Agar ada input ke kami, bagaimana yang lebih efisien dan tidak melanggar aturan, hasilnya juga bisa optimal." Setelah pengawasan, kami akan lakukan penagihan. Karena piutangnya Rp 19 miliar, sehingga kami harus mengurai itu, terbesar dari PBB, ini warisan dari KPP Pratama sejak tahun 2013," ungkap dia sesuai rapat. Dalam pengawasan ini, lanjutnya, pertama dilakukan pembahasan oleh tim pengawas pajak daerah. Kemudian nanti akan ditetapkan daftar prioritas wajib pajak. Mulai dari PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) Makanan/Minuman, Hotel,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBL), dan PBB-P2.

Terkait pajak makanan dan hotel, yang jadi masalah utama adalah terkait alat perekaman atau tapping box, yang digunakan untuk mendeteksi transaksi pada suatu tempat usaha. "Pajak makanan dan hotel yang menggunakan tapping box ada 21 wajib pajak yang masuk daftar prioritas pengawasan."

Ia menjelaskan, permasalahan yang dihadapi ada yang tidak mau memasang alat perekaman elektronik (tapping box), lalu kedua pelaku usaha sudah tutup tapi alat (tapping box) belum dikembalikan, jumlah pembayaran setiap masa pajaknya tidak sama dengan transaksi yang direkam dalam tapping box. "Wajib pajak yang masuk prioritas kita, karena ada yang tidak pakai tapping box, bayar pajaknya besar, mau setor 5 juta, tapi kalau dipasang tapping box bisa lebih besar lagi," papar Toni.

Belum Tepat Waktu

Lalu soal pajak tambang, lanjutnya, masalah klasiknya sama yakni pembayaran belum tepat waktu. Sementara untuk pajak PBB pedesaan dan perkotaan, setelah diidentifikasi masalah yang sering terjadi adalah di blok perumahan.

"Wajib pajak atau pembeli kavling, niatnya investasi sehingga tidak tinggal di Purworejo, kita kesulitan menyampaikan SPPT PBB, sehingga tidak terbayar," katanya.

Tim pengawasan ini, imbuh Toni, dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan akan didampingi dari Satpol PP. Setelah dilakukan pengawasan langsung, lalu tim pengawas akan merumuskan rekomendasi hasil pengawasan. (fid-48)